

STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA DAERAH DALAM MEMPERSIAPKAN MASYARAKAT TIMOR TIMUR MENYONGSONG ERA INDUSTRIALISASI

Inyo Yos Fernandez

1. Pendahuluan

Pengertian *strategi* yang sering dikaitkan dengan kebijakan (*policy*) dapat mengandung arti "rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu". Demikian informasi yang dipetik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988). Objek atau sasaran yang dimaksud, jika dihubungkan dengan pokok bahasan seperti tertera pada topik ini, mengenai masalah pembangunan budaya daerah maka sasaran yang dimaksud terarah pada upaya penyusunan kebijakan (baru) di bidang budaya daerah. Kebijakan itu, seperti diungkapkan Van Peursen (1976: 18), berupa sikap dan alam pikiran masyarakat dalam mengadakan kebertautan baru (relasi-relasi baru) terhadap segala sesuatu di lingkungannya. Lebih lanjut, menurut Van Peursen, dalam relasinya dengan pembangunan, strategi budaya daerah dalam hal ini sebenarnya mengandung jangkauan masalah yang lebih luas artinya daripada yang tersurat dalam makna kebijakan (*strategi*) budaya itu an sich.

Kebudayaan pada hakikatnya memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Menurut pengertian yang lebih kontemporer, kebudayaan sesungguhnya diartikan sebagai manifestasi kehidupan tiap orang dan tiap kelompok orang dalam masyarakat. Kebudayaan meliputi semua perbuatan manusia. Kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif manusia modern untuk memikirkan dan merencanakan arah yang ditempuh oleh kebudayaan manusia pada umumnya.

Strategi budaya daerah dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa pada umumnya maupun pembangunan daerah khususnya niscaya perlu diselaraskan. Hal ini mungkin karena esensi kebudayaan itu sendiri memerlukan ulah kerja manusia untuk mengutik-ngutik lingkungan hidup alam di sekitarnya. Karya dan karsa manusia dalam pembangunan senantiasa mengupayakan kebijakan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup berdasarkan norma-norma tertentu, melalui proses perubahan keadaan semula kepada keadaan yang lebih baik dari seluruh sistem sosial. Pernyataan serupa itu tersirat dalam pengertian tentang pembangunan itu sendiri, seperti diungkapkan Myrdal (via Patji, 1983: 323) dalam definisi mengenai pembangunan.

Kebudayaan nasional, seperti dinyatakan dalam UUD 1945, pasal 32, merupakan kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya rakyat

Indonesia seluruhnya. Lebih lanjut ditegaskan, "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan nasional. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, ..." Strategi kebudayaan nasional yang selaras dengan UUD 1945, dengan demikian, merupakan strategi yang mampu membimbing proses modernisasi dan pembangunan sehingga menjaga dan memperkuat kepribadian nasional, kontinuitas kebudayaan, dan kemampuan untuk mandiri, sekaligus memperkuat kesatuan nasional (Soedjatmoko, 1976:5). Di tempat lain, seperti dirumuskan dalam GBHN (1988), keselarasan strategi kebudayaan nasional dengan strategi kebudayaan regional seolah tertata sebagai kewajiban yang bersifat imperatif. "Dalam rangka upaya mengembangkan kebudayaan bangsa yang berkepribadian nasional, perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah serta menyerap nilai-nilai budaya dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan."

Strategi pembangunan budaya daerah Timor Timur tidak tercantum secara tersurat dalam buku Repelita IV, apabila kita telusuri penjelasan-penjelasan yang membahas masalah "Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Propinsi Timor Timur (Repelita IV, 1984). Namun, dalam perincian masalah pembangunan yang terpusat pada item-item budaya, sebagaimana tercermin dalam upaya pembangunan jaringan transportasi, peningkatan ekonomi yang bertalian dengan sistem pertaniannya, serta peningkatan kesehatan, pendidikan, penerangan, dan fasilitas sosial lainnya, niscaya secara tersirat strategi pembangunan budaya Timor Timur terungkap.

Walaupun, pada kenyataannya, bukan merupakan hal yang mustahil bahwa kebudayaan tidak jarang diidentifikasi sebagai hal-hal yang berhubungan dengan bahasa atau kesenian, kedua item kebudayaan itu banyak kali terlupakan kalau kita mempersoalkan masalah pembangunan sebagai manifestasi budaya.

Dalam pembicaraan ini, lebih lanjut untuk dapat membatasi persoalan yang menyangkut strategi pembangunan budaya daerah yang sedemikian luas ruang lingkupnya, akan dibahas salah satu aspek budaya yang khusus, yaitu masalah bahasa, sebagai sebuah contoh konkret yang memerlukan pertimbangan strategi pembangunan budaya daerah Timor Timur dalam rangka mempersiapkan masyarakat menyongsong era industrialisasi.

2. Permasalahan Bahasa dan Strategi Pembangunan Budaya Daerah

Dalam menyongsong era industrialisasi, masyarakat Timor Timur, yang sebagian besar (seperti tersebut dalam buku Repelita IV, 1984: 790; Ensiklopedia Indonesia, Suplemen, 1986:513) termasuk golongan masyarakat agraris, perlu dipersiapkan untuk dapat berpartisipasi aktif

agar cita-cita pembangunan di wilayah ini dapat tercapai sesuai dengan target. Dengan kata lain, tanpa dukungan masyarakat, percepatan (akselerasi) pembangunan yang memerlukan perubahan mentalitas masyarakat agraris menuju masyarakat industri yang sesuai dengan era industrialisasi niscaya tidak akan tercapai.

GBHN (1988), dalam butir 3.g., menggariskan bahwa sebagai wahana kebudayaan bangsa "bahasa daerah perlu dibina terus dan dilestarikan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa. Dalam pada itu, bahasa daerah perlu terus dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya masyarakatnya yang mendukung kebhinekaan budaya sebagai kreativitas dan sumber kekuatan bangsa. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah."

Dalam strategi pembangunan budaya daerah, perlu dipertimbangkan implikasi peranan masyarakat dalam pembaharuan mentalitas sebagai faktor utama dan penting dalam meraih keberhasilan yang ditargetkan. Salah satu langkah yang diperlukan adalah bagaimana upaya membawa masyarakat agar dapat memahami kemajuan yang diprogramkan oleh pembangunan dalam berbagai bidang. Peranan bahasa sebagai salah satu bagian integral dari kebudayaanlah dalam hal ini dapat memberi jawaban yang lebih memuaskan dalam menanggapi permasalahan itu.

Sesuai dengan gambaran seperti yang dapat disimak dari rumusan GBHN 1988 (tentang bahasa daerah) tersebut di atas, strategi pembangunan budaya daerah perlu menyimak pertimbangan yang memperhitungkan pengembangan dan pembinaan budaya daerah, khususnya sarana komunikasi bahasa daerah, yang akan mampu mengikutsertakan masyarakat Timor Timur dalam pemahaman (secara baik dan menyeluruh) akan konsep-konsep pembangunan yang dicanangkan dan aktif berpartisipasi sebagai agen pembaharuan dalam akselerasi pembangunan menyongsong era industrialisasi.

Adanya beragam kendala pembangunan yang dihadapi, sebagaimana terwujud antara lain dalam "tembok-tembok" isolasi, jika tidak diantisipasi dengan baik akan mendatangkan hambatan yang berarti bagi pembangunan. Upaya mempertahankan "keterisolasian", dapat dipandang sebagai mekanisme pelindung untuk dapat bertahan ("survive") dari sikap opresif golongan lain. Kelompok masyarakat tertutup, khususnya masyarakat petani (kecil), dalam kondisi tidak berdaya, seringkali menaruh rasa curiga terhadap berbagai tindakan golongan lain (kelompok non petani). Dalam hal tersebut, stagnasi karena salah paham yang mungkin terjadi hanya akan dapat teratasi apabila masih ada rasa percaya kepada para pejabat yang berurusan dengan pembangunan itu sendiri. Keterisolasian masyarakat yang merupakan problem pembangunan dapat teratasi melalui perubahan budaya yang perlu dipertimbangkan melalui strategi pembangunan budaya daerah yang terencana.

Dalam kerangka strategi pembangunan budaya Timor Timur perlu dipertimbangkan situasi kebahasaan yang khusus di wilayah ini. Sebagai misal, dalam situasi keanekaragaman bahasa (*multilingual*), kedudukan dan fungsi bahasa Tetum Dili, yang memainkan peranan kunci sebagai wahana penyebaran informasi pembangunan yang efektif di Timor Timur, perlu mendapat perhatian yang lebih besar, tanpa mengabaikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Hal ini perlu diberi perhatian yang lebih proporsional, karena hanya melalui pemahaman akan maksud dan tujuan pembangunan itu secara lebih baik, melalui bahasa Tetum Dili (yang telah lama dikenal sebagai bahasa perantara (*lingua franca*), pesan-pesan pembangunan lebih efektif dikomunikasikan kepada berbagai lapisan masyarakat di Timor Timur. Betapa tidak, konsep-konsep pembangunan yang dilahirkan oleh budi manusia dan diformulasi secara baik melalui bahasa yang mudah dipahami akan menimbulkan efek komunikasi yang menyebabkan masyarakat akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Sebagai *lingua franca*, bahasa Tetum Dili telah menduduki peranan penting dalam kehidupan masyarakat keanekaragaman untuk menjembatani kesenjangan yang mungkin timbul apabila terjadi kontak antarpemutut yang berlainan bahasanya. Peranan ini telah cukup lama dimainkan oleh bahasa Tetum Dili. Seperti dicatat Forbes (1884) (via Thomas, 1974), sejak 1769, ketika Dili dicatat sebagai propinsi *ultra mare* (di seberang lautan), peranan sebagai *lingua franca* telah dimainkan oleh bahasa Tetum Dili. Penyebarannya di wilayah geografis yang cukup luas dimungkinkan oleh peranan dua kerajaan (Son Bai dan Bai Hale) yang pada masa lampau mempunyai pengaruh kekuasaan yang menjangkau hingga ke daerah-daerah di pelosok yang jauh. Berbarengan dengan perluasan kekuasaan, terbina komunikasi dengan media bahasa Tetum Dili pada masa lampau, menyebabkan peluang yang menguntungkan bagi bahasa Tetum Dili menduduki fungsi yang lebih penting serta peran yang cukup dominan jika dibandingkan dengan bahasa daerah lainnya di Timor Timur.

Menurut garis kebijakan yang dirumuskan dalam politik bahasa Nasional, seperti diungkapkan Halim (1976), bahasa daerah dengan peran seperti yang dimainkan oleh bahasa Tetum Dili, sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari di lingkup masyarakat aneka bahasa, termasuk bahasa daerah yang dihormati karena selain dipelihara masyarakatnya, merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia. Bahasa Indonesia, di pihak lain, menurut politik bahasa nasional, mengemban fungsi sebagai bahasa resmi negara, pengantar pada berbagai lembaga pendidikan, alat komunikasi pada tingkat nasional, pengembang kebudayaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Perubahan budaya, seperti yang terjadi pada bahasa Tetum Dili dewasa ini, memperlihatkan implikasi yang penting yang menunjukkan bahwa sikap dan alam pikiran masyarakat telah dapat beradaptasi dengan

lingkungan di sekitarnya yang terus mengalami perubahan. Perlu dicatat, bahwa dewasa ini bahasa Tetum Dili telah beralih fungsinya, yang semula sejajar dengan bahasa daerah lain (sebagai bahasa rendah), menuju tingkat yang lebih tinggi (sebagai bahasa menengah) mengimbangi keberadaan bahasa Indonesia yang menduduki posisi sebagai bahasa tinggi. Sesuai dengan posisi tersebut, fungsi bahasa Tetum Dili di samping bahasa daerah lain di Timor Timur telah semakin jelas dalam rangka merumuskan strategi pembangunan budaya daerah yang perlu memperhatikan keselarasan dengan strategi pembangunan budaya nasional.

3. Penutup

Dari tinjauan masalah kebahasaan dalam kaitannya dengan strategi pembangunan budaya daerah, seperti yang diuraikan di atas, beberapa pertimbangan yang perlu diajukan dalam rangka perumusannya meliputi beberapa hal berikut ini.

Strategi pembangunan budaya daerah perlu disinkronkan dengan strategi pembangunan budaya nasional dalam arti, dengan bijak mempertimbangkan kepentingan nasional yang secara hierarkhis lebih mendahulukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Strategi pembangunan budaya daerah, seperti yang terlihat dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan di Timor Timur, khususnya menyangkut bahasa Tetum Dili, perlu mempertimbangkan secara cermat kondisi-kondisi terkait yang secara wajar dan alami mempengaruhi fenomena kehidupan budaya di lingkungannya.

Dalam rangka strategi pembangunan budaya daerah, perlu dipikirkan lebih lanjut agar tugas yang diemban oleh bahasa Daerah seperti Tetum Dili dapat dikembangkan dan ditingkatkan manfaatnya sebagai wahana penyebar informasi pembangunan yang lebih merata, karena didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang merasakan secara langsung efek komunikatif amanat pembangunan yang diterimanya.

Daftar Pustaka Acuan

- Depdikbud. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Halim, Amran. 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa: Jakarta.
- Patji, A. Rachman. 1983. "Saling Ketergantungan antara Desa dan Kota." Dalam *Basis*, 9(32): 323.
- Van Peursen, C. A. 1976. *Strategi Kebudayaan* (terjemahan Dick Hartoko). Kanisius: Yogyakarta.

- Sudjatmoko. 1976. "Kata Pengantar dalam *Strategi Kebudayaan*, karangan C.A. Van Peursen." Kanisius: Yogyakarta (hlm. 5).
- Thomas, Louis Philipe, F.R. 1974 *Timor, Notas Historice-Linguistica Portugaliae Historici-Revista de Institute Infante D. Henrique de Faculdade de Letras de Lisboa*: Lisboa.